



Pertanggungjawaban perusahaan real estat terhadap pembangunan berwawasan lingkungan :: Studi kasus

di grup Damai Putra Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

WIJANARKO, Bagus Priyo, Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML.

Universitas Gadjah Mada, 2002 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**The Accountability of Real Estate Firms for Environmentally Sustainable Development.
(a Case Study of the Damai Putra Group in Sleman Regency, Special Region of
Yogyakarta)**

**Pertanggungjawaban Perusahaan Real Estat Terhadap Pembangunan Berwawasan
Lingkungan
(Studi Kasus di Grup Damai Putra Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Oleh : Bagus Priyo Wijanarko, SH
Program Studi : Ilmu Hukum
Instansi Asal : Universita Atma Jaya Yogyakarta
Pembimbing Utama : Prof. DR. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML.
Tanggal Wisuda : 25 September 2002

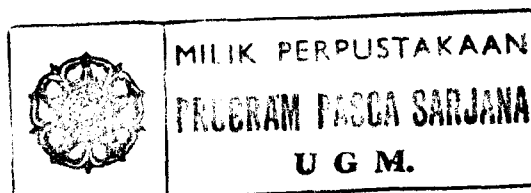
INTISARI

Sumber alam utama dalam pengembangan permukiman dan perumahan adalah ruang air dan udara, untuk singkatnya lahan dan air. Kelangsungan kawasan perumahan dan permukiman banyak ditentukan oleh kondisi tanah dan air yang dikelola baik. Oleh karena itu, dalam pengembangan permukiman khususnya perumahan, penggunaan ruang perlu ditata sedemikian rupa sehingga kemampuan alam menyerap kualitas air sebanyak mungkin dapat dipelihara. Hal ini disebabkan sumber alam air akan menjadi faktor yang semakin langka, apabila kegiatan pengembangan permukiman dan perumahan tidak dikendalikan dan paku negatifnya. Dalam upaya memelihara sanitasi permukiman dan perumahan, kegiatan pencegahan pencemaran kepada air harus dilaksanakan pula sedini mungkin.

Keberadaan perumahan dan permukiman sebagai tempat tinggal bagi setiap orang sudah merupakan kebutuhan yang mendesak. Dengan semakin perkembangnya angka kelahiran di Indonesia yang cukup tinggi. Ketersediaan lahan untuk perumahan dan permukiman yang semakin sempit, sering menimbulkan gangguan keseimbangan lingkungan khususnya air.

Dalam Undang-undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (disingkat UUPR), Pemerintah telah menggariskan mengenai pengelolaan sumber daya alam yang beranekaragam di daratan, di lautan, dan di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Kata Kunci: *"Sumber alam utama dalam pengembangan permukiman dan perumahan adalah ruang air dan udara, untuk singkatnya lahan dan air".*





Pertanggungjawaban perusahaan real estat terhadap pembangunan berwawasan lingkungan :: Studi kasus

The Accountab

di grup Damai Putra Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

(a Case Study of the Damai Putra Group in Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta)

WIJANARKO, Bagus Priyo, Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, SH., ML.

Universitas Gadjah Mada, 2002 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Oleh : Bagus Priyo Wijanarko, SH
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Instansi Asal : Universita Atma Jaya Yogyakarta
 Pembimbing Utama : Prof. DR. Koesnadi Hardjosoemantri, SH., ML.
 Tanggal Wisuda : 25 September 2002

ABSTRACT

The chief natural resources for the development of residential areas and housing are space, water, and air, or land and water for short. The continued existence of housing and residential areas is largely dependent on the conditions of land and water. Therefore, spatial use needs to be managed in such a way that the natural capacity to absorb as much water as possible can be maintained because water will be a scarce resource if the negative impact of the development of residential areas and housing is not effectively controlled. In efforts to maintain the sanitary conditions of residential areas and housing, preventive measures against water pollution should be taken as early as possible.

The availability of housing and residential areas is an urgent need. The ever-increasing birth-rate in Indonesia and the decreasing availability of housing and residential areas often result in a disturbance to environmental equilibrium.

In Act No. 24 of 1992 concerning Spatial Use Management, the Government has laid down regulations on the management of various natural resources on land, in the sea and the air, and the need for coordinate and integrated management with human resources and man-made resources within a sustainable development framework by developing spatial use in a dynamic environmental unity and continuing to ensure environmental conservation in accordance with environmentally sustainable development founded on the Archipelago Concept and National Resilience.

Key words: "natural resoures, housing development, land water".

